



PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. RABANI MERYANTO HALAWA, S.H., M.H  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DEDIE TRI HARIYADI, S.H., M.H  
Jabatan : Pr. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengasinan, 04 Agustus 2025.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pr. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
RIAU,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
ROKAN HULU

(DEDIE TRI HARIYADI, S.H., M.H)

(DR. RABANI MERYANTO HALAWA, S.H., M.H)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU  
TAHUN 2025**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pengustaran peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyeragaman kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Perundangan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	100%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	100%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	90%
4	Memperkuat Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	90
		Nilai Kinerja Anggaran	100

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp2.801.958.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp7.629.183.000
Jumlah		Rp10.431.141.000

#### D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Ultras Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi

Pada Pengantar, 04 Agustus 2025,

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

PA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
RIAU

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BOKAN JALU

(DEDIE TRI HARIYADI, S.H., M.H)

(DR. H. BAREM HALAWA, S.H., M.H)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang beranda tangan dibawah ini:

Nama : HENDRO WIDODO, S.E  
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. RABANI MERYANTO HALAWA, S.H., M.H  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pass Pengantoran, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
ROKAN HULU



Dr. Rabani M. Halawa, S.H., M.H

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

(Hendro Widodo, S.E)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran kejaksaan RI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100%
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan	90%
3	Meningkatnya tertib penyelenggaraan tata kelola aset	Tingkat pemenuhan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara	88%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dan masing-masing Sekter	90%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan Sarana Internal	Rp 215,000,000
2	Layanan Umum	Rp 30,000,000
3	Layanan Perkantoran (Gaji dan Tunjangan)	Rp 5,158,183,000
4	Layanan Perkantoran (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)	Rp 2,226,000,000
Jumlah		Rp 7,629,183,000

#### D. PRIORITAS NASIONAL

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jeksa Agung.

Pesir Pengarsipan, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
DIKORPRI PANDEGLI

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,



(Dr. Helmi M. Helmi, S.H., M.H)

(Hendro Widodo, S.E)



PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : VEGI FERNANDEZ, S.H., M.H

Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. RABANI MERYANTO HALAWA, S.H., M.H

Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU

(Dr. Rabani M. Halawa, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,

(Vegi Fernandez, S.H., M.H.)

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

### KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU

#### A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

#### B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industriisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

#### C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	100%
2	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan masyarakat	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan masyarakat	100%
3	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	bidang ekonomi dan keuangan	100%
4	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	100%
5	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	100%
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	100%
7	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan/ Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu	Rp 28.600.000
2	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu	Rp 34.900.000
3	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu	Rp 7.250.000
4	Lembaga yang Telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu	Rp 12.804.000
5	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu	
	Jaksa Masuk Sekolah	Rp 28.000.000
	Jaksa Menyapa	Rp 15.200.000
	Jaksa Menjawab	Rp 9.200.000
6	Posko Bandara	Rp 6.780.000
7	DPO	Rp 58.350.000
	Jumlah	Rp 201.084.000

#### D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

**E. KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Pasir Pengaraian, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BOKAN HILU,

  
(Dr. Robert M. Halawa, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELJEN,

  
(Vega Fernandez, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RENDI PANALOSA, S.H., M.H  
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. RABANI M. HALAWA, S.H., M.H  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengajaran, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN  
HULU,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,



(Dr. Rabani M. Halawa, S.H., M.H)

(Rendi Panalosa, S.H., M.H)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formulasi	Target
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan  $\frac{\text{Jumlah perkara yang didusukan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah perkara yang didusukan}} \times 100$	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang <i>in kracht van gewijsde</i> zaai	Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang berhasil	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Formulasi	Target
	Perkara Tindak Pidana Umum	(Berkuatan Hukum Tetap) yang telah Dieksekusi	dieksekusi (badan dan barang bukidbarang rampasan)  ----- x  100  Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukidbarang rampasan)	

NO	Kegiatan	Anggaran
1.	PRA PENUNTUTAN	Rp. 342.760.000,-
2.	PENUNTUTAN	Rp. 823.419.000,-
3.	RESTORATIVE JUSTICE	Rp. 12.352.000,-
4.	EKSEKUSI	Rp. 238.600.000,-
	Jumlah	Rp. 1.417.131.000,-

## D. PRIORITAS NASIONAL

## E. KINERJA TAMBAHAN

Pasir Pengaraian, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN  
HULU,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM,



(Rahmat M. Halawa, S.H., M.H.)

(Renaldi P. Fossa, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cahli Aziz, S.H., M.H  
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Rabani Meryanto Halawa, S.H., M.H  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu

Selaku atasannya langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wakil Pengantar, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu

(Dr. Rabani M. Halawa, S.H., M.H)

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus,

(Cahli Aziz, S.H., M.H)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS  
KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULLU**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Peranganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	100%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	100%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	100%
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	100%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		pada tahap penuntutan	
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	100%
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	100%
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	0%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabean, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	0%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	0%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyidikan	Rp.73.802.000,-
2	Penyidikan	Rp.181.850.000,-
3	Pra Penuntutan dan Penuntutan	Rp.214.299.000,-
4	Eksekusi	Rp.61.576.000,-
	Jumlah	Rp.531.327.000,-

#### D. PRIORITAS NASIONAL

- Nihil

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Pihak Kedua,

Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru

(Dr. Ridwan M. Nalawa, S.H., M.H.)



Pasir Pengaraian, 04 Agustus 2025

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus,

(Gusti Adiz, S.H., M.H.)





**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARIE DARYANTO, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. RABANI MERYANTO HALAWA, S.H., M.H  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengarsipan, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
ROKAN HULU

(Dr. Rabani M. Halawa, S.H., M.H)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA  
USAHA NEGARA,

(Arie Daryanto, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**  
**KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	100%
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur non Litigasi	100%
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	100%
3	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	90%
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara	90%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp. 7.200.000
2	Pengelolaan HALO JPN di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp. 8.000.000
3	Pertimbangan Hukum/Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp. 4.650.000
4	Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Rp. 8.940.000
5	Perkam Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Rp. 26.250.000
Jumlah		Rp. 53.040.000

#### D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Pasir Pengaraian, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
ROKAN HULU



(Dr. Robson D. Harms, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA  
USAHA NEGARA,



(Arie Daryanto, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : STEFANO ALEXANDER ARON MARBUN, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. RABANI MERYANTO HALAWA, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pada Pengeraian, 04 Agustus 2025

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN  
PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU



Dr. Rabani M. Halawa, S.H., M.H.

(Stefano Alexander Aron Marbun, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI**  
**KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	100%
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	100%
2	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pemeliharaan Barang Bukti/Sitaan/Rampasan	Rp. 91.978.000,-
2	Pemusnahan Barang Bukti	Rp. 84.000.000,-
3.	Penyelesaian Barang Rampasan/Sitaan	Rp. 80.404.000,-
Jumlah		Rp. 216.382.000,-

## D. PRIORITAS NASIONAL

## E. KINERJA TAMBAHAN

NO	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	FORMULASI	TARGET
1	Pemeliharaan Barang Bukti/Sitaan/Rampasan	Pemeliharaan Barang Bukti/Sitaan/Rampasan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan Barang Bukti</li> <li>• Pemusnahan Barang Bukti</li> <li>• Penyelesaian Barang Rampasan/Sitaan               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lelang</li> <li>2. Delivery BB</li> </ol> </li> </ul>	1 Tahun 4 kegiatan  2 Kegiatan 12 Kegiatan

Pasir Pengaraian, 04 Agustus 2025

Pihak Pertama,

 KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN  
 PENGELOLAAN BARANG BUKTI,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU



(R. Soesilo M. Halawa, S.H., M.H.)

(Stefano Alexander Aron Marbun, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AZWARDI DERY, SH, M.H  
Jabatan : Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Pada Seksi Tindak Pidana Khusus

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : GALIH AZIZ, S.H, M.H  
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Passir Pengantalan, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus,

  
(GALIH AZIZ, S.H, M.H)

Pihak Pertama,

Kepala Subseksi Penyidikan dan  
Pengendalian Operasi Pada Seksi Tindak  
Pidana Khusus

  
(AZWARDI DERY, SH, M.H)

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Kejaksaan Negeri Rokan Hulu

### A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

### B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirasahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

### C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	100 %
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	100 %
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	100 %

		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	100 %
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	100 %
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	100 %
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	100 %
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	0%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	0%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	0%

No	Rincian Output	
1	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	
2	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	
Jumlah		

#### D. PRIORITAS NASIONAL

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Pasir Pangaraian, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus,



(G. HAZIZ, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Kepala Subseksi Penyidikan dan  
Pengendalian Operasi Pada Seksi Tindak  
Pidana Khusus



(AZWARDI DERY, SH., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAKHRUL AGMI, S.H  
Jabatan : Plt. Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Bidang Tindak Pidana Khusus.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : GALIH AZIZ, S.H, M.H  
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaralan, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus



(GALIH AZIZ, S.H, M.H)

Pihak Pertama,

Plt. Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya  
Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Bidang  
Tindak Pidana Khusus



(FAKHRUL AGMI, S.H)

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Kejaksaan Negeri Rokan Hulu

### A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

### B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memertajakan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

### C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	100 %
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	100 %
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap	100 %

		penyidikan	
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	100 %
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	100 %
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	100 %
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	100 %
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepbebasan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepbebasan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	0%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepbebasan, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	0%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepbebasan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	0%

No	Rincian Output	
1	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II Riau	
2	Pelebaran Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya, Terpidana Ditahan Dalam Rumah Tahanan Wilayah II Riau	
	Jumlah	

**D. PRIORITAS NASIONAL**

**E. KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Paes Pengarahan, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus,



(GALIH AZIZ, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Pt. Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya  
Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Bidang  
Tindak Pidana Khusus.



(FAKHRUL AGMI, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AISYAH NURUL PERMATASARI, S.H., M.Kn.  
Jabatan : Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARIE DARYANTO, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pada Pengantar, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha  
Negara

Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha  
Negara

(ARIE DARYANTO, S.H., M.H.)

(AISYAH NURUL PERMATASARI, S.H., M.Kn.)

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Kejaksaan Negeri Rokan Hulu

### A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

### B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui owasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

### C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Pelaksanaan kegiatan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi dan non-litigasi	100%
2	Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lainnya	Pelaksanaan pendampingan hukum	100%
		Pelaksanaan kegiatan SKK	100%
		Pelaksanaan kegiatan pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya	100%

No	Rincian Output	
1	Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada persidangan gugatan permik KPU Rokan Hulu di Mahkamah Konstitusi	
2	Pelaksanaan pendampingan hukum pada kegiatan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan BUMN	
3	Pelaksanaan pelayanan hukum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang diajukan oleh Masyarakat secara gratis	
Jumlah		

#### D. PRIORITAS NASIONAL

-

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif Instruksi Jaksa Agung.

Pasir Pengasinan, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha  
Negara

Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha  
Negara




(ARIE DARYANTO, S.H., M.H.)

(AISYAH NURUL PERMATASARI, S.H., M.Kn.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IKA FELASTRI, S.H  
Jabatan : Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARIE DARYANTO, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sepenuhnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengaraian, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha  
Negara

(ARIE DARYANTO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum

(IKA FELASTRI, S.H.)

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Kejaksaan Negeri Rokan Hulu

### A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

### B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

### C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Pelaksanaan kegiatan penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi dan non-litigasi	100%
2	Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum pelayanan hukum, dan tindakan hukum lainnya	Pelaksanaan pendampingan hukum	100%
		Pelaksanaan kegiatan SKK	100%
		Pelaksanaan kegiatan pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya	100%

No	Rincian Output	
1	Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada persidangan gugatan pemilu KPU Rokan Hulu di Mahkamah Konstitusi	
2	Pelaksanaan pendampingan hukum pada kegiatan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan BUMN	
3	Pelaksanaan pelayanan hukum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang diajukan oleh Masyarakat secara gratis	
Jumlah		

#### D. PRIORITAS NASIONAL

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Pesir Pengarsipan, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha  
Negara



(ARIE DARYANTO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha  
Negara



(IKA FELASTRI, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kartini, S.H.  
Jabatan : Kepala Sub Seksi II

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Vegi Fernandez, S.H.,M.H.  
Jabatan : Kepala Seksi Intelijen

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasar Pengantar, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Intelijen,

(Vegi Fernandez, S.H.,M.H.)

Pihak Pertama,

Kepala Sub Seksi II Intelijen,

(Kartini, S.H.)

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Kejaksaan Negeri Rokan Hulu

### A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

### B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesenian, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

### C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	100%
2	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	100%
3	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	produksi intelijen	intelijen	
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	100%
5	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	100%

No	Rincian Output	
1	Kegiatan/ Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu	
2	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu	
3	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu	
4	Lembaga yang Telah diberi Penerangan hukum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu	
5	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu	
	Jaksa Masuk Sekolah	
	Jaksa Menyapa	
	Jaksa Menjawab	
6	Posko Bandara	
7	DPO	
	Jumlah	

#### D. PRIORITAS NASIONAL


-

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Pesir Pengajaran, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Seksi Intelijen,

  
(Vagi Fernandez, S.H.,M.H.)

Pihak Pertama,  
Kepala Sub Seksi II Intelijen,

  
(Kartini, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Harry Mashuri, S.H.  
Jabatan : Kepala Sub Seksi I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Vegi Fernandez, S.H.,M.H.  
Jabatan : Kepala Seksi Intelijen

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengarian, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Intelijen,

(Vegi Fernandez, S.H.,M.H.)

Pihak Pertama,

Kepala Sub Seksi I Intelijen,

(Muhammad Harry Mashuri, S.H.)

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Kejaksaan Negeri Rokan Hulu

### A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

### B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

### C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan	100%
2	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan masyarakat	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan masyarakat	100%
3	Meningkatnya operasi	Persentase pelaksanaan Operasi	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	100%
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	100%
5	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	100%

No	Rincian Output	
1	Kegiatan/ Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu	
2	Kegiatan Pengawasan Afiliasi Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu	
3	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu	
4	Lembaga yang Telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu	
5	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Rokan Hulu	
	Jaksa Masuk Sekolah	
	Jaksa Menyapa	
	Jaksa Menjawab	
6	Posko Bandara	
7	DPO	
	Jumlah	

#### D. PRIORITAS NASIONAL

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung

Pasar Pengarian, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Inteljen,

(Vegi Fernandez, S.H.,M.H.)

Pihak Pertama,

Kepala Sub Seksi I Inteljen,

(Muhammad Hafy Mashuri, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DAVID RAJA PANGHUTAN, SH  
Jabatan : Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RENDI PANALOSA, S.H, M.H  
Jabatan : Kepala Seksi Pidana Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasar Pengisian, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Pidana Umum,

(RENDI PANALOSA, S.H, M.H)

Pihak Pertama,

Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi dan  
Eksaminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum,

(DAVID RAJA PANGHUTAN, S.H)

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Kejaksaan Negeri Rokan Hulu

### A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

### B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

### C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian perancangan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	100 %
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Perancangan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan	100%
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan	---

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase perkara tindak pidana umum yang in krocht van gewu'dezaam (Berkeluaran hukum tetap) yang telah dieksekusi	100%
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	100%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Peruntutan dan Peruntutan Pada Kejaksaan Negeri	.....
2	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri	
3	Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri	.....

#### D. PRIORITAS NASIONAL

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peruntutan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Pasir Pengendalian, 04 Agustus 2025.

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Pidana Umum,

(RENAN S. KOSA, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

Kepala Subseksi Peruntutan, Eksekusi dan Ekaminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum,

(DAVID RAJA ANGELITAN, SH)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : EKO WIRA SETIAWAN, S.H  
Jabatan : Kepala Subseksi Prapenuntutan, pada Seksi Tindak Pidana Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RENDI PANALOSA, S.H, M.H  
Jabatan : Kepala Seksi Pidana Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pada Pengantar, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Pidana Umum,

  
(RENDI PANALOSA, S.H, M.H)

Pihak Pertama,

Kepala Subseksi Prapenuntutan, pada  
Seksi Tindak Pidana Umum,

  
(EKO WIRA SETIAWAN, S.H)

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Kejaksaan Negeri Rokan Hulu

### A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

### B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

### C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	100%
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-	

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	Perkara Tindak Pidana Umum	Penuntutan	100%
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan	---
		Persentase perkara tindak pidana umum yang in kracht van gewisdezaak (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi	100%
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	100%

#### D. PRIORITAS NASIONAL

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Pasir Pengaraian, 04 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Kepala Seksi Pidana Umum,

  
(RENNY YANALOSA, S.H. M.H)

Pihak Pertama,

Kepala Subseksi Praperenuntutan, pada  
Seksi Tindak Pidana Umum,

  
(EKO WIRA SETIAWAN, S.H)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : ATIKAH SEPTIA YOLANDA, S.H.  
Jabatan : Kepala Urusan Perengkapan, Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HENDRO WIDODO, S.E.  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasir Pengantren, 09 September 2025

Pihak Kedua,

Kepala Sub Bagian Pembinaan,

(Hendro Widodo, S.E.)

Pihak Pertama,

Kepala Urusan Perengkapan,  
Data Statistik Kriminal dan Teknologi  
Informasi dan Perpustakaan,

(Atikah Septia Yolanda, S.H.)

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Kejaksaan Negeri Rokan Hulu

### A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

### B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

### C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan BMN secara Terbuka dan Transparan	Persentase laporan BMN tepat waktu dan sesuai ketentuan	87%
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerja yang Memadai	Tingkat pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor	85%
3	Pemeliharaan Fasilitas Kantor	Persentase fasilitas kantor dalam kondisi layak pakai	80%

No	Rincian Output	Anggaran
1	Laporan BMN Semesteran/Tahunan	
2	Penyediaan Kebutuhan ATK dan Perlengkapan Kantor	
3	Pemeliharaan Gedung, Kendaraan Dinas dan Sarana Prasarana	
Jumlah		

#### D. PRIORITAS NASIONAL

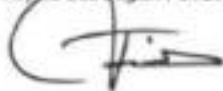
#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Pasir Pengaraian, 09 September 2025

Pihak Kedua,

Kepala Sub Bagian Pembinaan,



(Hendro Widodo, S.E.)

Pihak Pertama,

Kepala Urusan Perlengkapan,  
Data Statistik Kriminal dan Teknologi  
Informasi dan Perpustakaan,



(Atikah Nurul Yolanda, S.H.)